PERKEMBANGAN ARENA KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM

Nama : Chyntia Pebriana Dewi

Email : chyntiapebriana@gmail.com

No BP : 2110003600372

Universitas Ekasakti

A. PENDAHULUAN

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata Anthropolos berarti manusia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Pitirim Sorokin mengatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejalaekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (nonsosial). Berbeda dengan pendapat Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Berdasarkan uraian di atas, maka Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan. Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari juga mengenai Peran, Status atau kedudukan, Nilai, Norma dan juga Budaya atau kebudayaan. Kesemuanya ini merupakan hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum. Antropologi melihat hukum sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku dan

masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat diperbaiki. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami modernisasi. Batasan ini dikemukakan oleh Paul Bohanan. Menurut J.B. Daliyo dkk, antropologi hukum adalah antropologi yang mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Kemudian Hilman Hadikusuma memberikan pendapat mengenai antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum.

B. PEMBAHASAN

Ilmu Antropologi. Apa itu Ilmu Antropologi? Secara etimologi (bahasa) antropologi berasal dari kata *anthropos* yang bermakna manusia dan *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan atau wacana. Sederhananya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk beluk, unsur-unsur, kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Ekonomi masyarakat, agama dan keyakinan, politik pemerintahan, fisik manusia, kesehatan, perkembangan teknologi dan sebagainya adalah ruang studi bagi Ilmu Antropologi, sehingga apabila kita cermati lebih dalam, kajian dan studi mengenai antropologi memang cukup luas cakupannya dan sangat dinamis. Ilmu Antropologi dibagi ke dalam dua sub yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik terbagi lagi menjadi paleoantropologi dan antropologi ragawi. Sedangkan antropologi budaya terdiri dari prehistori, etnolinguistik, dan etnologi. Sang maestro antropolog Indonesia mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Antropologi Hukum, sebagai ilmu pengetahuan yg merupakan spesialisasi dari Antropologi Budaya. Sebagai ilmu Pengetahuan memiliki 4 (empat) hal ; adanya, Objek, Metode, Sistem dan Universal Antropologi Hukum, adalah Ilmu pengetahuan (logos) tentang Manusia (antropos) yg berhubungan dengan Hukum Manusia, adalah manusia yg hidup bermasyarakat, masyarakat yg masih sederhana budayanya (primitif) dan yang sudah Maju (modern) Budaya adalah Budaya Hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi Masalah Hukum. Masalah Hukum, tidaklah hanya pada masalah Hukum yang Normatif (dalam Perundangan) dan masalah hukum yang merupakan Pola perilaku yg sering terjadi (Hukum Adat). Tetapi juga masalah Budaya terhadap suatu masalah Hukum, dikarenakan adanya Faktor Budaya yg mempengaruhinya. Faktor-faktor Budaya yg melatarbelakangi Masalah Hukum ; misalnya, Cara-cara menyelesaikan Masalah Perselisihan dikalangan Orang Batak, tidak sama dengan orang Minang, Jawa, Bali, Maluku dan lainnya Cara-cara tersebut menjadi Objek perhatian Antropologi Hukum.

Antropologi mempelajari perkembangan kehidupan manusia dan budayanya, dengan cabang-cabang ilmu, diantaranya; ilmu PraSejarah untuk mempelajari kehidupan asal usul manusia, dan untuk mengetahui ragam bahasa manusia maka harus mempelajari Etnolinguistik, sedangkan ilmu yang mempelajari cara manusia berbangsa dan berbudaya disebut Etnologi. Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia dari Aspek Budaya, Perilaku, Nilai, Keanekaragaman, dan lainnya.

Antropologi terbagi dalam: Antropologi Ekonomi, Antropologi Politik, Antropologi Pendidikan, dan Antropologi Hukum. Antropologi Hukum merupakan ilmu yg mempelajari manusia dengan kebudayaan, khususnya di bidang Hukum, atau ilmu tentang Manusia dalam kaitannya dengan Kaidah-kaidah sosial yang bersifat Hukum.

Kajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Arena Antropologi Hukum mempelajari manusia dan budaya hukum karenanya kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian Antropologi Hukum.

Norma / kaidah menurut Antropologi Hukum pola ulangan perilaku dalam masyarakat.

Norma / Kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar.

Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan sanksi bersifat negatif seperti hukuman badan atau dikucilkan..

Hukum muncul dari peradaban manusia, dimana ada 2 orang atau lebih di situ ada hukum.

Sifat Keilmuan Antropologi Hukum

1. Antropologi Hukum tidak membatasi pandangan pada kebudayaan tertentu (studi perbandingan).
2. Antropologi Hukum, mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, dimana bagian-bagiannya saling bertautan.
3. Antropologi Hukum Modern tidak memusatkan perhatian hanya pada kekuatan sosial dan hal superorganis.
4. Antropologi Hukum memandang masyarakat secara Dinamis, sehingga peranan sosial dan Hukum tidak terbatas mempertahankan status quo.
5. Antropologi Hukum termasuk ilmu Hukum yang empiris.

Ruang Lingkup Antropologi Hukum

Ruang Lingkup Antropologi Hukum adalah suatu spesialisasi dari Antropologi Budaya, Antropologi Sosial, dan Kebudayaan Hukum yang menyangkut Aspek – aspek Hukum.

Laura Nader dalam bukunya “The Anthropological Study of Law “ (1965), mengemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup Antropologi Hukum sebagai berikut:

1. Apakah dalam setiap masyarakat terdapat Hukum dan bagaimana karakteristik Hukum yg Universal?
2. Bagaimana Hubungan antara Hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial?
3. Apakah mungkin diadakan Tipologi Hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas?
4. Apakah Tipologi Hukum berguna untuk menelaah hubungan antara Hukum dengan Aspek Budaya dan organisasi sosial, dan
5. Mengapa Hukum itu berubah, serta bagaimana cara mendeskripsikan Sistem-sistem Hukum?

Kaitan Antropologi Hukum dengan ilmu sosial lainnya

1. Antropologi Hukum dengan Hukum Adat
2. Antropologi Hukum dengan Sosiologi
3. Antropologi Hukum dengan Etnologi
4. Antropologi Hukum dengan Religi
5. Antropologi Hukum dengan Psikologi Sosial

Fase-Fase Perkembangan Antropologi

1) Fase Pertama

- Fase Penemuan dan Pencatatan
- Sebelum thn 1800
- Muncul Istilah Etnografi (konsep pelukisan suku bangsa)

Ex. W. Marsden (Inggris) di Bengkulu thn 1873 menulis “The History of Sumatera” tentang suku-suku bangsa di Indonesia (Minangkabau, Rejang); Pelayaran Kapten Cook dengan menemukan Sandwich, Kaledonia baru, bagian kepulauan Polinesia dengan adat kebiasaan pribumi Selandia Baru, Australia. Munculnya Museum pertama di Kopenhagen-Denmark tahun 1841 oleh CJ. Thomsen. Dimulai dari kedatangan bangsa Eropa Barat ke benua Asia, Afrika, Oceania, dan Amerika selama empat abad yang kebanyakan oleh para musafir, pelaut, pendeta nasrani, dan pegawai pemerintah jajahan mengumpulkan laporan, kisah perjalanan dan pengetahuan berupa deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat dan ciri-ciri fisik penduduk pribumi tersebut. Bahan deskripsi itu disebut etnografi (ethos = bangsa). Beberapa pandangan Eropa barat terhadap masyarakat pribumi tersebut. Muncul berbagai sikap di kalangan terpelajar Eropa. Sebagian memandang tentang sifat keburukan dari bangsa-bangsa yang dituliskan itu. Mereka itu sesungguhnya bukan manusia, manusia liar, turunan iblis. Terhadap mereka layak disebut savages, primitives, dan lain-lain. Sebagian memandang sikap baik dari bangsa yang dilukiskan. Itulah masyarakat yang masih murni, belum kemasukan kejahatan dan sifat buruk, iri, dengki, materialis, sebagaimana masyarakat Eropa pada umumnya. Sebagian lagi dari kalangan terpelajar Eropa tertarik akan keanehan dan keunikan adat istiadat bangsa yang dituliskan itu timbul suatu upaya dan usaha mengumpulkan benda-benda hasil kebudayaan suku bangsa tersebut, selanjutnya dihimpun, sehingga timbullah lembaga semacam "museum" tentang kebudayaan.

2) Fase Kedua

- Fase Penyusunan dan Analisis Bahan Etnografi
- Pertengahan abad ke-19
- Konsep Evolusi, bahwa masyarakat dan kebudayaan manusia telah berevolusi sangat lambat

dulu jangka waktu ribuan tahun lamanya, dari tingkat rendah melalui tingkat antara sampai tingkat tertinggi dan kompleks.

- Antropologi menjadi ilmu yg bersifat Akademik, dengan tujuan mempelajari manusia dan masyarakat serta kebudayaan yang primitif guna memperoleh konsep tentang tingkatan kuno dulu sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

Masyarakat Eropa kala itu berpikir bahwa masyarakat dan kebudayaannya lambat laun akan berevolusi dalam beberapa tahun lamanya dan menempuh berbagai tingkatan dari tingkatan, dari tingkatan rendah ke tingkatan yang tertinggi. Masyarakat Eropa kala itu menganggap bahwa bentuk masyarakat dan kebudayaan tertinggi adalah Eropa barat. Masyarakat di luar Eropa Barat adalah primitif yang tingkat kebudayaannya lebih rendah yang masih hidup sampai sekarang, sebagai sisa-sisa dari kebudayaan manusia zaman dulu. Timbulnya klasifikasi/ tingkatan evolusi masyarakat dan beragam kebudayaan di dunia maka timbullah Ilmu Antropologi dan menyebabkan timbulnya pula karangan hasil penelitian tentang sejarah penyebaran kebudayaan bangsa-bangsa. Pada fase ini ilmu antropologi masuk ke dalam ilmu akademis dengan tujuan: mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitive dengan maksud untuk mendapat suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

3) Fase Ketiga

- Fase Kolonialisme - Imperialisme (Eksistensi Negara Eropa/Amerika)
- Permulaan Abad ke-20
- Tujuan bersifat Praktis, yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan untuk mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks.

Setelah sebagian Eropa memantapkan kekuasaannya di daerah jajahan luar Eropa maka ilmu antropologi menjadi sangat penting karena pada umumnya masyarakat tersebut masih belum kompleks seperti masyarakat bangsa Eropa. Sebagai contoh Amerika yang mengalami berbagai masalah yang berhubungan dengan suku-suku bangsa Indian penduduk pribumi benua Amerika, kemudian terpengaruh oleh ilmu antropologi tadi. Sehingga mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks.

4) Fase Keempat

- Fase Era Pembaharuan dan Penemuan Ilmu Antropologi
- Beberapa hal yg menjadi ilmu Antropologi berkembang Pesat :
 - Bertambah koleksi bahan pengetahuan
 - Ketajaman Metode Ilmiah
 - Hilangnya bangsa primitif (bangsa asli dan terpencil)

Sesudah tahun 1930

- Tujuan bersifat Praktis dan akademikal,
- Akademikal, mencari pengertian tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan
- Praktis, mempelajari manusia dalam aneka warna suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Pada fase keempat, antropologi telah berkembang secara sangat pesat. Selain karena bertambahnya bahan pengetahuan yang jauh lebih teliti dan ketajaman metode ilmiah dalam penelitiannya, faktor lain yang mempengaruhi adalah :
 - Timbulnya antipati terhadap kolonialisme sesudah perang dunia ke II
 - Cepat hilangnya bangsa-bangsa primitif (dalam arti bangsa-bangsa asli dan terpencil dari

pengaruh kebudayaan Eropa -Amerika). Suku-suku bangsa ini sekitar tahun 1930 mulai hilang dan sesudah perang dunia ke-2 memang hampir tidak ada lagi di muka bumi ini. Kedua proses tersebut menyebabkan hilangnya lapangan ilmu antropologi ini sehingga timbul keinginan memperluas dengan tujuan baru. Para ilmuwan dan tokoh antropologi di berbagai negara Amerika dan Eropa (termasuk Uni Soviet) mengadakan symposium merumuskan pokok tujuan dan ruang lingkup ilmu antropologi sehingga para peneliti mengembangkan ilmu antropologi yaitu tidak hanya mempelajari suku bangsa primitive namun beralih ke manusia pedesaan baik di Eropa maupun di luar Eropa, yang ditinjau dari ragam fisik, masyarakat dan kebudayaannya. Tetapi warisan dari fase pertama, kedua dan ketiga tidak dibuang begitu saja namun sebagai landasan perkembangan yang baru. Mengenai tujuannya, perkembangan ilmu antropologi yang keempat ini dibagi menjadi dua, yaitu: tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis adalah mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman bentuk fisiknya, masyarakat serta kebudayaannya. Tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa guna membangun suku bangsa masyarakat itu.

Jadi Kajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Arena Antropologi Hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, karenanya kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian Antropologi Hukum. Norma/kaidah menurut Antropologi Hukum pola ulangan perilaku dalam masyarakat. Norma/Kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar. Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan

sanksi bersifat negatif seperti hukuman badan atau dikucilkan. Hukum muncul dari peradaban manusia, dimana ada 2 orang atau lebih di situ ada hukum.

C. PENUTUP

Antropologi Hukum, adalah Ilmu pengetahuan (logos) tentang Manusia (antropos) yang berhubungan dengan Hukum Manusia, adalah manusia yang hidup bermasyarakat, masyarakat yang masih sederhana budayanya (primitif) dan yg sudah Maju (modern). Harus disadari bahwa hukum lahir dan berkembang dari sebuah kebudayaan, sehingga akan menjadi logis bahwa tidak ada hukum yang seragam, karena tidak ada kebudayaan yang bersifat seragam. Hukum yang berlaku bagi masyarakat suatu suku tentu akan berbeda dengan masyarakat dalam suku yang lain dan untuk Negara yang seluas dan sebesar Indonesia, tentu apabila diberlakukan hukum secara seragam terhadap masyarakat yang memiliki beragam kebudayaan bisa menimbulkan masalah keadilan. Dalam perspektif Antropologi hukum, hukum lahir dari kebudayaan, melihat hal tersebut, menyadarkan kepada kita bahwa peran Antropologi hukum adalah perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum, yang lahir dan berkembang pula dari berbagai corak dan ragam kebudayaan. Antropologi hukum merupakan realitas atau kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan dan hidup di masyarakat. Jadi Kajian Antropologi Hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Arena Antropologi Hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, karenanya kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian Antropologi Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201.
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017.
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018,
<https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017,
<https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..